



Said Almaududi<sup>1</sup>

## BLUE ECONOMY DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

### Abstrak

Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau yang tersebar di seluruh kepulauan dan garis pantai yang membentang sepanjang 81.000 km, lebih dari separuh dari total luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya lautnya. Namun, tantangan seperti illegal fishing dan kurangnya pemberdayaan masyarakat pesisir mengancam keberlanjutan sektor perikanan. Implementasi konsep Blue Economy menjadi kunci untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui studi literatur, artikel ini menyelidiki strategi implementasi Blue Economy dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia untuk mencapai SDGs, khususnya tujuan ke-14: Life Below Water. Diperlukan langkah strategis seperti peningkatan pengawasan, pengembangan teknologi, dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Dengan potensi besar dalam sektor akuakultur, Indonesia dapat mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi antara berbagai pihak dan penerapan prinsip-prinsip Blue Economy yang inovatif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Blue Economy, SDGs, Sektor Perikanan

### Abstract

Indonesia is home to approximately 17,500 islands scattered across its archipelago and coastline spanning 81,000 kilometers, with more than half of its total area consisting of seas and waterways. This geographical condition positions Indonesia as a country rich in maritime resources. However, challenges such as illegal fishing and the lack of empowerment of coastal communities threaten the sustainability of the fisheries sector. The implementation of the Blue Economy concept is key to achieving Sustainable Development Goals (SDGs). Through literature review, this article investigates strategies for implementing the Blue Economy in empowering communities in Indonesia to achieve SDGs, particularly Goal 14: Life Below Water. Strategic steps such as increased monitoring, technology development, and infrastructure development are needed to enhance community welfare and sustainably manage marine resources. With significant potential in the aquaculture sector, Indonesia can realize its vision of sustainable development through collaboration among various stakeholders and the application of innovative and sustainable Blue Economy principles.

**Keywords:** Blue Economy, SDGs, Fisheries Sector

### PENDAHULUAN

Indonesia, dengan statusnya sebagai negara kepulauan yang telah ditetapkan sejak Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS), menawarkan potensi sumber daya laut yang luar biasa. Dengan sekitar 17.500 pulau yang tersebar di seluruh kepulauan dan garis pantai yang membentang sepanjang 81.000 km, lebih dari separuh dari total luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Keberlimpahan ini membuka pintu lebar dalam pengembangan sektor perikanan, yang menjadi pusat perhatian utama pemerintah dalam merangsang pertumbuhan produksi dan meningkatkan ekspor produk kelautan dan perikanan. Data menegaskan tren positif, dengan nilai ekspor produk perikanan naik dari USD3,78 miliar pada 2016 menjadi USD4,09 miliar pada 2017. Namun, di tengah

<sup>1</sup> Universitas Batanghari Jambi  
email: saidalmaududi@gmail.com

kesuksesan ini, tantangan seperti Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing tetap menjadi hal yang harus diperhatikan dengan serius. Perlindungan terhadap ekosistem laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan sektor ini (Rosmiati & Saputra Hutabarat, 2021).

Di sisi lain, meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah, pemanfaatan potensi laut masih jauh tertinggal dibandingkan dengan sumber daya daratan. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi yang tersedia dan kurangnya upaya dalam mengoptimalkan potensi laut secara efektif. Meskipun luas kepulauan Indonesia mencapai 2,8 juta km<sup>2</sup> dan luas wilayah perairan mencapai 5,9 juta km<sup>2</sup>, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), klaim atas Landas Kontinen di luar 200 mil seluas 3500 km<sup>2</sup> di sebelah barat Aceh menunjukkan bahwa potensi laut Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Upaya untuk mengembangkan potensi laut secara berkelanjutan dan inklusif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs (Sustainable Development Goals) atau pembangunan berkelanjutan merupakan agenda 2030 yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan yang universal, integratif, dan inklusif, dengan tujuan memastikan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal (No one left behind). Resolusi ini memiliki 17 tujuan dan 169 target yang dirancang bersama oleh negara-negara dalam sebuah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015, sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Salah satu tujuan dari SDGs ini adalah Life Below Water, yang bertujuan untuk menjaga ekosistem laut dengan mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan (Hutabarat & Ekawarna, 2023).

Pemanfaatan potensi laut secara bijaksana merupakan kunci utama bagi Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial, negara ini dapat mengoptimalkan sumber daya laut untuk mencapai berbagai sasaran pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Melalui implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya melalui konsep blue economy, Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut secara lebih efektif dan berkelanjutan. SDGs memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan lingkungan dan pemberdayaan sosial (Nurdin et al., 2022) & (Mayasari et al., 2023).

Dengan demikian, penerapan SDGs di sektor kelautan dan perikanan akan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (Rosmiati, Nurmala Sari, Novia Sri Dwijayanti, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki strategi implementasi konsep Blue Economy dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia guna mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian (Habsy, 2017). Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam hal ini, analisis dilakukan terhadap data dari artikel-artikel yang relevan dengan konsep Blue Economy dalam konteks mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) poin 14, yang berkaitan dengan life below water. Studi literatur ini difokuskan pada artikel, buku, maupun jurnal yang relevan serta dilengkapi dengan data pendukung dari sumber resmi seperti World Bank, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pendekatan ini memberikan landasan yang kokoh bagi penelitian untuk menyusun strategi implementasi Blue Economy yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia, khususnya dalam perlindungan kehidupan bawah air dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut oleh Masyarakat Indonesia di Sektor Perikanan

Potensi sumber daya laut Indonesia merupakan aset yang sangat berharga dan memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas wilayah laut yang mencakup sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>, yang merupakan rumah bagi beragam ekosistem laut dan keanekaragaman hayati. Keadaan ini memberikan potensi yang besar dalam sektor perikanan, dengan Indonesia menjadi salah satu produsen perikanan terbesar di dunia.

Keragaman komoditas perikanan di Indonesia berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya (Aprilia & Mulyanie, 2023). Perikanan tangkap Indonesia memiliki potensi yang melimpah, baik di perairan laut maupun darat. Produksi lestari dari perikanan tangkap laut mencapai sekitar 9,3 juta ton per tahun, sedangkan perikanan tangkap di perairan darat mencapai sekitar 0,9 juta ton per tahun. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam perikanan budidaya, dengan produksi lestari mencapai 56,8 juta ton per tahun. Potensi ini menciptakan peluang besar bagi sektor ekonomi kelautan Indonesia.

Sektor ekonomi kelautan tidak hanya terbatas pada perikanan, tetapi juga meliputi berbagai sektor lainnya seperti industri pengolahan hasil perikanan, pariwisata bahari, pertambangan dan energi, serta sumber daya wilayah pulau-pulau kecil. Total potensi nilai ekonomi keseluruhan sektor kelautan Indonesia diperkirakan mencapai 1,33 triliun dolar AS per tahun, dengan potensi lapangan kerja mencapai sekitar 45 juta orang.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pemanfaatan sumber daya laut Indonesia masih belum optimal. Masih terdapat tantangan dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing. Illegal fishing secara sederhana berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, atau kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan illegal jika terdapat aturan-aturan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan (Jamilah & Disemadi, 2020).

Selain itu, aspek kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir juga menjadi salah satu perhatian penting. Mengingat sebagian besar dari mereka masih hidup dalam kondisi yang kurang sejahtera (Hutabarat, 2023). Dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya laut, diperlukan upaya serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, pengembangan teknologi dalam sektor perikanan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor kelautan dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

### Implementasi Konsep Blue Economy di Indonesia

Blue economy adalah konsep dalam mengoptimalkan sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang ada yang dikelola secara inovatif dan kreatif serta tetap menjaga serta menjamin sebuah proses dalam keberlanjutan sebuah usaha dengan memperhatikan kelestarian lingkungan (Al Fahri et al., 2022). Blue economy mencakup segala aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan eksploitasi dan pemanfaatan potensi laut, dari sektor perikanan hingga pariwisata bahari. Tujuan utama dari penerapan konsep ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang komprehensif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan Blue economy, terutama mengingat kedudukannya sebagai negara maritim dengan jumlah pantai terpanjang kedua di dunia. Proyeksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa nilai Blue economy Indonesia pada tahun 2045 diperkirakan akan mencapai USD 7,4-9,8 triliun, meningkat secara signifikan dari perkiraan sebelumnya yang hanya sekitar USD 1,3 triliun pada tahun 2021.

Salah satu potensi besar dalam Blue economy Indonesia adalah hutan mangrove. Perlindungan hutan mangrove menjadi salah satu fokus utama dalam upaya menjaga keberlanjutan kawasan pesisir. Upaya pengelolaan sumber daya mangrove dengan prinsip efisiensi sumber daya, zero waste, tanggung jawab sosial, sistem siklus produksi, inovasi dan

adaptasi, serta kelembagaan yang berkelanjutan dikenal dengan manajemen ekonomi biru (Firmansyah & Rahayu, 2022).

LindungiHutan, sebuah organisasi yang berkomitmen untuk menjaga hutan mangrove di Indonesia, telah melakukan berbagai upaya rehabilitasi dan konservasi hutan mangrove di berbagai lokasi pesisir. Dengan melibatkan petani dan kelompok masyarakat setempat dalam proses penanaman dan monitoring, LindungiHutan tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

Pentingnya penanaman mangrove juga terlihat dari kontribusinya dalam penyerapan karbon. Setiap pohon mangrove mampu menyerap sekitar 24 Kg karbon selama periode penanaman 3 tahun, menjadikannya sebagai alternatif yang potensial untuk offset karbon bagi perusahaan serta sebagai sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat pesisir. Dengan demikian, penerapan konsep Ekonomi Biru di Indonesia tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak positif pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

### **Strategi Blue Economy di Indonesia dalam Mencapai SDGs 14: Life Below Water**

SDGs merupakan inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disahkan pada tahun 2015, bertujuan untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2030, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan nomor 14 berfokus pada pentingnya menjaga sumber daya laut dan

kelautan, termasuk melalui pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan menciptakan manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara maritim terbesar di dunia, memiliki kewajiban dan potensi besar dalam mencapai target SDGs 14, terutama dalam sektor akuakultur. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menekankan pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Konsep Ekonomi Biru Berkelanjutan telah menjadi landasan bagi visi misi KKP dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang kompetitif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sustainable Blue Economy, atau Ekonomi Biru Berkelanjutan, merupakan pendekatan pembangunan terkini yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Sektor akuakultur, sebagai bagian dari konsep ini, memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dan penyediaan pangan global. Produksi akuakultur Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dengan kontribusi yang semakin besar terhadap pasokan pangan dunia. Potensi besar dalam sektor akuakultur Indonesia mencakup berbagai komoditas unggulan seperti udang, kepiting, lobster, rumput laut, dan nila.

Penekanan pada pengembangan teknologi, akses permodalan, infrastruktur pendukung, standarisasi benih, dan kestabilan harga dan akses pasar menjadi kunci dalam mewujudkan akuakultur yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi akuakultur sebagai motor penggerak ekonomi dan penopang ketahanan pangan, sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dalam SDGs.

### **SIMPULAN**

Dalam pemanfaatan sumber daya laut, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang dan luas wilayah laut yang mencakup sebagian besar dari total luas wilayahnya. Potensi ini memberikan peluang besar dalam pengembangan sektor perikanan dan ekonomi kelautan, yang menjadi fokus utama dalam merangsang pertumbuhan produksi dan meningkatkan ekspor produk kelautan. Namun, tantangan seperti illegal fishing dan kesejahteraan masyarakat pesisir tetap menjadi hal yang harus diperhatikan dengan serius. Perlindungan ekosistem laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan. Diperlukan upaya serius dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi laut, termasuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, pengembangan teknologi, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Al Fahri, A. A., Norrahmawati, D., Bailovan, K. D., Alfarez, R. U., Rahmawati, S. A., Kismartini, K., & Purnaweni, H. (2022). Reformasi Implementasi Konsep Blue Economy

- sebagai Upaya Proteksi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kota Semarang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(3), 168-174.
- Hutabarat, Z. S. (2023). Kesulitan Belajar Akuntansi Keuangan (Studi Kasus Pada Materi Merchandise Inventory Management). *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 5(2), 149. <https://doi.org/10.24014/ekl.v5i2.19154>
- Hutabarat, Z. S., & Ekawarna, E. (2023). Development of Teaching Materials on Learning Economic Models to Improve Students' Cognitive Achievement. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(2), 1204–1212. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.1679>
- Mayasari, Siti Syuhada, & Zuhri Saputra Hutabarat. (2023). *Ekonomi Internasional* Penerbit Cv.Eureka Media Aksara.
- Nurdin, Sembiring, B., Phongsavath, P., Rahmawati, & Hutabarat, Z. S. (2022). Akuntansi Biaya. 1–23.
- Rosmiati, Nurmala Sari, Novia Sri Dwijayanti, Z. S. H. (2021). Increasing Student Economic Analysis Ability Through the Application of Case Study Methods in Capita Selekt Courses. 12(10), 2480–2490.
- Rosmiati, R., & Saputra Hutabarat, Z. (2021). Hubungan Persepsi Mahasiswa tentang Mata Kuliah Kewirausahaan dan Hasil Belajar dengan Minat Berwirausaha Mahasiswa Reguler Angkatan 2013 Pendidikan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 11(2), 342. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v11i2.232>